

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG

Nanik Tsania Hasni

Program Pascasarjana Universitas Stikubank

e-mail : tsania.hasni@gmail.com

Basukianto

Program Pascasarjana Universitas Stikubank

e-mail : basukianto@ymail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze and describe the influence and activities of budget planning, procurement, human resource competencies, regulations and disbursement process to absorption in Batang regency government.

The population in this research were employees of 52 regional work units (SKPD) and 8 officers at the District Secretariat at Batang Regency. The sample used officials related to the disbursement of the budget namely the Financial Administration Officer (PPK) SKPD, treasurer and treasurer expenditure at Batang regency government. Data in this research is the primary data sourced from the questionnaire. Analysis techniques data using SPSS regression program.

The results of this research can be concluded that the budget and activity planning, procurement, human resource competencies, regulations and the disbursement process positively affects to the uptake budget. The most dominant to influence the uptake budget followed by a variable the planning and activities, the disbursement process of funds, procurement of goods and services and human resource

Keywords: *budget planning and activities, procurement, human resource competencies, regulations and disbursement process and the absorption of budget*

Pendahuluan

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran belanja pemerintah Kabupaten Batang, belum mencerminkan persentase yang mengembirakan berdasarkan periode per triwulan. Berdasarkan kondisi saat ini yang ditandai dengan rendahnya penyerapan pada Triwulan I dan Triwulan II akan berpotensi mendorong terjadi lonjakan penyerapan pada Triwulan III dan Triwulan IV. Pada tahun 2012 hingga tahun 2014 penyerapan masih tergolong lambat.

Tabel. 1

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Pemerintah Kabupaten Batang

PERIODE	2012	2013	2014
Triwulan I	11.88%	10.80%	11.51%
Triwulan II	33.97%	29.56%	32.86%
Triwulan III	55.69%	55.11%	58.32%
Triwulan IV	88.49%	90.83%	91.39%

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab. Batang

Kegagalan target penyerapan anggaran ini mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki daerah dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan daerah yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran (Cardisiawan, 2009).

Penyerapan anggaran belanja pengadaan barang/jasa pada umumnya sangat lambat dalam realisasinya dan seringkali menumpuk diakhir tahun, hal ini terjadi karena berbagai kendala yang dihadapi baik administrasi

maupun teknis. Proses lelang yang lambat, terlambatnya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pembinaan dari pemerintah pusat, keengganan pegawai untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dan sulitnya mendapatkan pegawai bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa (Laporan Tim Warta BPKP 2011). Percepatan penyerapan anggaran belanja pengadaan barang/jasa patut menjadi perhatian pemerintah demi tercapainya pelayanan publik sebagaimana yang diamanahkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Manfaat percepatan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa dapat dirasakan oleh masyarakat dengan menikmati hasil pembangunan lebih cepat, pembangunan infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, dan juga *Net Present Value* dari APBD yang lebih baik (UKP4, 2012).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran, diantaranya dengan melakukan perubahan yang keempat terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang nyata, distribusi penyerapan anggaran yang proporsional sepanjang tahun belum terwujud dan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa masih rendah. Berbagai resep pemerintah untuk mempercepat penggunaan anggaran sepertinya belum manjur, jangankan menjadi lokomotif ekonomi, penyerapan dana belanja pemerintah selama kuartal I-2015 tetap saja masih lemah (Kontan 7 April 2015). Menurut Kuntoro dalam Rmol.co (2012) mengungkapkan bahwa realisasi belanja selama semester I tahun 2012 menunjukkan hanya pos belanja pegawai yang lancar, sedangkan belanja barang dan modal masih rendah.

Penyerapan anggaran yang terlambat perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi. Banyak faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya adalah faktor perencanaan, faktor proses pengadaan barang dan jasa, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor regulasi dan faktor sistem pencairan dana

TINJAUAN PUSTAKA

Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan oleh DPRD. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah daerah sebagai pelaksana dari Perda APBD selanjutnya menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD sebagai dasar hukum pelaksanaan APBD.

“Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, berapa yang berhasil dicapai. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan” (Mardiasmo, 2009). Dalam teori ekonomi makro, belanja pemerintah merupakan salah satu elemen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Belanja pemerintah, khususnya belanja barang dan jasa, merupakan salah satu komponen utama yang membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP).

PDB dibentuk melalui unsur-unsur pengeluaran konsumsi pribadi, investasi swasta, ekspor netto (ekspor – impor), dan belanja pemerintah. Semakin besar keuangan negara yang dibelanjakan, maka akan semakin besar porsi pemerintah dalam membentuk PDB, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri terbentuk dari peningkatan jumlah PDB. Pertumbuhan

ekonomi dihitung dari peningkatan PDB tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan bidang ekonomi. Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap pemerintah daerah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Namun demikian penyerapan anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi penyerapan anggaran diharapkan mampu memenuhi setidaknya tidaknya lebih dari 80% anggaran yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu pemerintah daerah menjadi tolak ukur kinerja dari pemerintah daerah tersebut.

1. Pengaruh Faktor Perencanaan Anggaran dan Kegiatan terhadap Penyerapan Anggaran

Perencanaan anggaran disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Setiap Rencana Kerja menjadi landasan dalam pelaksanaan koordinasi dan monitoring implementasi rencana dalam maksud menghasilkan setiap sasaran hasil kinerja pembangunan. Perencanaan dapat dilihat pengaruhnya terhadap penyerapan anggaran melalui adanya revisi DPA, karena tidak sesuai dengan kebutuhan atau adanya kesalahan dalam penentuan akun/kode rekening. Hal ini dapat menunda realisasi anggaran sehingga berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Priatno (2013) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar juga menghasilkan faktor perencanaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja dan penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja

Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan hasil bahwa perencanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1: Perencanaan anggaran dan kegiatan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

2. Pengaruh Faktor Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pemerintah khususnya pemerintah daerah yang rendah atau menumpuk diakhir tahun anggaran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Hal ini tentu dapat menghambat pencapaian tujuan dari otonomi daerah yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat (3)]. Belanja barang/jasa pemerintah daerah memainkan peran yang penting dalam pencapaian tujuan otonomi daerah, karena belanja tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Belanja pengadaan barang/jasa memiliki porsi yang cukup besar dan penyerapannya sering mengalami kendala. Kendala antara lain terkait prosedur teknis, kelengkapan katalog barang dan jasa, perubahan mekanisme pengadaan, proses lelang yang lambat, terlambatnya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas, kurangnya pembinaan dari pemerintah pusat, keengganan pegawai untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dan sulitnya mendapatkan pegawai bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa (Laporan Tim Warta BPKP 2011).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat (1), definisi pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut: "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa Barang/Jasa.”

Pada organisasi pemerintah, penyerapan anggaran dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja. Laporan realisasi anggaran memuat informasi mengenai kecepatan, ketepatan dan kualitas penggunaan anggaran. Anggaran yang tidak terserap secara keseluruhan/menumpuk diakhir tahun mengindikasikan adanya target yang tidak tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan hasil bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

3. Pengaruh Faktor Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa dan pengelola keuangan membutuhkan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya secara tertib dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya (Peraturan Pemerintah 100 Tahun 2000). Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 43/KEP/2001 memberikan definisi tentang kompetensi sebagai berikut: (1) kompetensi, yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya; (2) kompetensi umum, yaitu kemampuan dan karakteristik yang harus

dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural; (3) kompetensi khusus, yaitu kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan struktural. LKPP mendefinisikan kompetensi kerja dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 3 Tahun 2011 sebagai kemampuan kerja setiap individu pegawai yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Trotter dalam Saifuddin (2004) memberikan definisi orang yang berkompoten adalah orang dengan keterampilannya melaksanakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sedikit atau tidak pernah membuat kesalahan. Dreyfus dan Dreyfus (1986) mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian seseorang yang berperan secara berkesinambungan melalui proses pembelajaran dari mengetahui sesuatu ke mengetahui bagaimana, misalkan dari sekedar pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu kepada suatu pernyataan yang bersifat intuitif. Dreyfus dan Dreyfus (1986) membagi proses pemerolehan keahlian menjadi lima tahap. Tahap kesatu adalah *novice*, yaitu pengenalan terhadap kenyataan dan membuat pendapat berdasarkan aturan/norma yang tersedia. Keahlian pada tahap pertama ini dimiliki oleh staf yang *fresh graduate* dari perguruan tinggi. Tahap kedua adalah *advanced beginner*, yaitu dapat membedakan antara aturan yang sesuai dengan suatu tindakan. Tahap ketiga adalah *competence*, yaitu mempunyai pengalaman yang cukup untuk menghadapi keadaan yang kompleks. Tahap keempat adalah *proficiency*, yaitu segala sesuatu menjadi rutin, sehingga dalam bekerja cenderung bergantung pada pengalaman sebelumnya dan mulai menggunakan analisa substansial. Tahap yang terakhir adalah *expertise*, yaitu mengetahui sesuatu karena kematangan dan pemahaman terhadap praktek yang ada, sehingga dapat membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan.

De Angelo (1981) memproksikan kompetensi dengan dua hal, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi tingkat pendidikan seseorang dan pelatihan yang didapat dalam bidang tugasnya. Pengetahuan akan meningkat dengan penambahan pelatihan formal (Bonner dan Walker 1994). Seseorang yang melaksanakan pekerjaan dengan pengetahuan yang memadai akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang memadai terhadap tugasnya. Pengetahuan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh pegawai pelaksana pengadaan barang/jasa dan pengelolaan keuangan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kinerja organisasi pada umumnya dan kinerja individu pada khususnya. Pengalaman kerja akan memperdalam dan memperluas kemampuan kerja, sehingga dapat meningkatkan keterampilan seseorang. Pegawai yang mempunyai pengalaman yang memadai dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dibanding mereka yang kurang berpengalaman. Dalam penelitian Herriyanto (2012) sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja dengan indikator pengukuran antara lain: sumber daya manusia pelaksana pengadaan kurang kompeten, adanya rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan, ketakutan pejabat untuk melaksanakan pengadaan akibat pemberitaan penangkapan atas tuduhan korupsi, keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena tidak seimbangnya resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima dan surat keputusan penunjukkan panitia pelaksana kegiatan swakelola belum ditetapkan. Memiliki kompetensi yang memadai memungkinkan seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Faktor kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan terhambatnya pekerjaan, pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut: Salah satu faktor utama yang menentukan baik atau tidak jalannya roda pemerintahan ini adalah sumber daya manusia.

Hal ini terlihat dari bagaimana manusia sebagai tenaga kerja menggunakan potensi fisik dan psikis yang ia miliki secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi (lembaga).

Pemerintah serta struktur dibawahnya sebaiknya mampu mewujudkan impian masyarakat melalui pembangunan daerah, karena pemerintah yang memiliki jabatan dan kuasa sebagai pengelola keuangan memiliki peran penting guna perwujudan harapan masyarakat. Fungsi pemerintah sebagai SDM dapat diwujudkan dalam prakteknya melalui kegiatan pemerintah sebagai pengelola keuangan negara dalam penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

4. Pengaruh Faktor Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori Tindakan Logis (*The Theory of Reasoned Action*) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) memodelkan perilaku nyata seseorang sebagai fungsi keinginan berperilaku (*behavioral intentions*). Argumentasi menggunakan model ini adalah bahwa model penelitian teoritis tersebut bisa menjelaskan dan memprediksi bagaimana aparat pemerintah daerah menerima seperangkat peraturan yang kompleks dan membutuhkan kemampuan dan *skill* teknis tertentu untuk memahami dan menerapkan dalam praktek kerja sehari-hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif dan Abdul Halim (2013) menemukan bukti empiris bahwa faktor regulasi mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2011. Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H4: Faktor Regulasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

5. Pengaruh Faktor Proses Pencairan Dana terhadap Penyerapan Anggaran

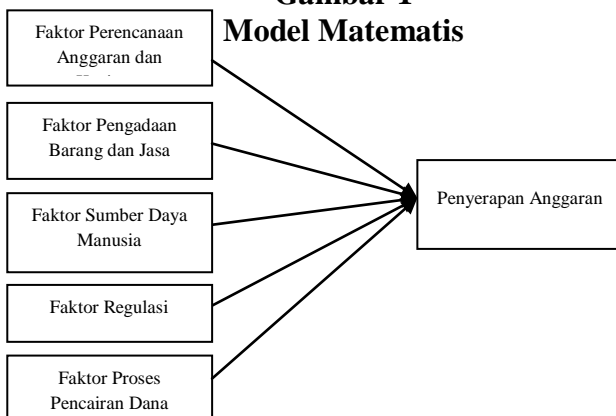
Dana merupakan kesatuan fiskal (*fiscal entity*) dan akuntansi (*accounting entity*), yang terpisah antara satu sama lain. Dana di sebut kesatuan fiskal karena dana memiliki sumber keuangan dan penggunaannya yang telah ditentukan dalam anggaran, dan dana disebut sebagai kesatuan akuntansi karena memiliki persamaan akuntansi. Pencairan dana langsung adalah: proses pencairan dana yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD kepada pihak yang berhak atau rekanan berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah.

Haryanto dan Wihascaryo (2011) dalam Seftianova dan Helmy Adam (2013) mengungkapkan bahwa tingkat akurasi penarikan dana yang rendah akan menyebabkan penumpukan pada anggaran yang tidak dicairkan tepat pada waktunya. Hal ini terjadi karena SKPD tidak mempunyai pedoman yang tepat mengenai kapan anggaran belanja seharusnya direalisasikan/dicairkan. Apabila tingkat akurasi penarikan dana yang rendah ini dibiarkan terjadi berlarut-larut maka akan mendorong terjadinya masalah penyerapan anggaran yang terkonsentrasi pada akhir tahun dimana SKPD berupaya mencairkan seluruh pagu dana yang tercantum dalam DPA. Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H5: Faktor Proses Pencairan Dana berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijabarkan dengan model grafis, sebagai berikut:

Gambar 1
Model Matematis



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pejabat SKPD dan Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang yang berkaitan dengan pencairan anggaran. Jumlah pejabat 111 orang yang tersebar di 52 SKPD dan 8 Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang. Mereka terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran Pembantu SKPD.

Karena jumlah populasi relatif kecil dan dapat dijangkau dari sisi waktu dan tenaga maka semua pejabat yang berkaitan dengan pencairan anggaran dijadikan responden. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini tidak dilakukan teknik sampling tetapi dilakukan dengan sensus

Teknik pengumpulan data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang ditujukan kepada masing-masing Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Butir pertanyaan dan pilihan jawaban dalam kuisisioner disesuaikan dengan variabel-variabel yang akan diukur. Kuisisioner diantarkan langsung kepada responden, dan jika memungkinkan kuisisioner akan langsung diambil kembali setelah diisi oleh responden. Namun, jika tidak memungkinkan maka kuisisioner akan diambil paling lambat 1 minggu setelah penyerahan atau sesuai waktu yang telah disepakati dengan responden. Kuisisioner terdiri atas pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tertutup, artinya responden hanya memilih satu alternatif jawaban yang telah tersedia. Kuisisioner diukur menggunakan skala likert dengan menggunakan penilaian: sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.

Teknik Analisis Data

a. Uji Kelayakan Instrumen penelitian

Uji kelayakan instrumen penelitian terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Exploratory Factor Analysis* (EFA), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang terkandung dalam variabel-variabel pengamatan tanpa penentuan teori pengukuran yang mengaturnya. Dalam pengukuran, masing-masing variabel dianggap hanya mempunyai satu dimensi. Suatu item pertanyaan/ pernyataan dianggap valid apabila *loading factor* (*component matrix*) yang dihasilkan memenuhi kaidah pengujian, yaitu lebih besar dari 0,4 (Ghozali, 2011). Perhitungan validitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 19.0 for windows.

Pengujian reliabilitas menggunakan metode *Cronbach Alfa*, dengan kriteria *Cronbach Alfa* dari masing-masing variabel lebih dari 0,7, maka alat ukur dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel (Ghozali, 2011).

b. Analisis regresi

Teknik analisa data kuantitatif adalah analisis statistik regresi berganda. Analisis ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Maka model analisa data dapat dinyatakan dalam persamaan :

$$PA = b_0 + b_1.RENC + b_2.BRG + b_3.SDM + b_4.REG + b_5.CAIR + e$$

Keterangan:

PA :Penyerapan Anggaran

b_0 : Konstanta

RENC :Faktor Perencanaan Anggaran dan Kegiatan

BRG :Faktor Pengadaan Barang & Jasa

SDM :Faktor Sumber Daya Manusia

REG :Faktor Regulasi

CAIR :Faktor Proses Pencairan Dana

$b_1 - b_5$: Koefisien Regresi

e : Kesalahan Random

c. Uji hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan apakah hipotesis yang dirumuskan diterima.

Uji hipotesis dilakukan dengan uji parsial (uji-t) dengan $\alpha = 5\%$ dan *degree of freedom* (df) = n-k, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen.

Hipotesis diterima jika tingkat signifikansinya $\leq 0,05$ dan $\beta > 0$, sebaliknya hipotesis ditolak jika tingkat signifikansinya > 0 dan /atau $\beta \leq 0$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi regresi disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Ringkasan Hasil Analisis Regresi

Variabel	Standardized Coefficients	t test	Signifikan (P-value)
Perencanaan anggaran dan kegiatan	0,323	4,377	0,000
Proses pengadaan barang dan jasa	0,218	3,097	0,003
Sumber Daya Manusia	0,218	3,095	0,003
Regulasi	0,398	5,511	0,000
Proses Pencairan Dana	0,265	3,760	0,000
F	22,172		
Adjusted R ²	0,504		
N	105		
Dependent Variabel	penyerapan anggaran		

Berikut adalah hasil dari regresi :

$$Y = 0,323 X_1 + 0,218 X_2 + 0,218 X_3 + 0,398 X_4 + 0,265 X_5$$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat dipersepsikan bahwa:

1. Perencanaan anggaran dan kegiatan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, semakin baik perencanaan anggaran dan kegiatan, maka penyerapan anggaran akan semakin baik pula.
2. Proses pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, semakin baik proses pengadaan

barang dan jasa, maka penyerapan anggaran akan semakin baik.

3. Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, semakin baik sumber daya manusia, maka penyerapan anggaran akan semakin baik.
4. Regulasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, semakin baik regulasi, maka penyerapan anggaran akan semakin baik.
5. Proses pencairan dana berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, semakin baik proses pencairan dana, maka penyerapan anggaran akan semakin baik.

Koefisien determinasi

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) regresi sebesar 0,504 yang berarti variasi perubahan keterlambatan penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh variabel perencanaan anggaran dan kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, regulasi dan proses pencairan dana sebesar 50,4%. Sedangkan sisanya sebanyak 49,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

Uji Goodness of Fit Model

Berdasarkan Tabel 1 nilai F hitung hasil regresi memberikan nilai F hitung sebesar 22,172 dengan probabilitas signifikan 0,000 kurang dari 0,05 (taraf nyata sama dengan 5 persen) yang berarti bahwa secara simultan variabel perencanaan anggaran dan kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, regulasi dan proses pencairan dana berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

Uji Hipotesis

1. Perencanaan anggaran dan kegiatan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran (Hipotesis 1)

Pada tabel 2 hasil analisis regresi menunjukkan bahwa signifikan 0,000 kurang dari 5%. Sehingga hipotesis pertama yang diajukan, yaitu perencanaan anggaran dan kegiatan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran **diterima**, artinya semakin baik perencanaan anggaran dan

kegiatan, maka akan semakin baik penyerapan anggaran.

2. Proses pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran (Hipotesis 2)

Pada tabel 2 hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,003 kurang dari 5%. Sehingga hipotesis kedua yang diajukan, yaitu proses pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran **diterima**, artinya semakin baik proses pengadaan barang dan jasa, maka akan semakin baik penyerapan anggaran (Keterlambatan penyerapan anggaran menurun).

3. Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran (Hipotesis 3)

Pada tabel 2 hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,003 kurang dari 5%. Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan, yaitu sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran **diterima**, artinya semakin baik sumber daya manusia, maka akan semakin baik penyerapan anggaran.

4. Regulasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran (Hipotesis 4)

Pada tabel 2 hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,000 kurang dari 5%. Sehingga hipotesis keempat yang diajukan, yaitu regulasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran **diterima**, artinya semakin baik regulasi, maka akan semakin baik penyerapan anggaran.

5. Proses pencairan dana berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran (Hipotesis 5)

Pada tabel 2 hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,000 kurang dari 5%. Sehingga hipotesis kelima yang diajukan, yaitu proses pencairan dana berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran **diterima**, artinya semakin baik proses pencairan dana, maka akan semakin baik penyerapan anggaran.

Pembahasan

1. Pengaruh perencanaan anggaran dan kegiatan terhadap penyerapan anggaran

Hasil temuan pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan kegiatan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran artinya semakin baik perencanaan anggaran dan kegiatan, maka akan semakin baik penyerapan anggaran, sebaliknya jika perencanaan anggaran dan kegiatan semakin buruk maka akan memperlambat penyerapan anggaran.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Priatno (2013), yang menemukan bahwa faktor perencanaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KKPN Blitar dan penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta dengan hasil bahwa perencanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

Hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten Batang menemukan bahwa dalam proses perencanaan anggaran dan kegiatan sering terjadi penyusunan RAB yang tidak sesuai/ lebih tinggi dari Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan. Hal ini disebabkan karena pada waktu penyusunan Raperda tentang APBD, Perbup tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan belum dibagikan kepada SKPD sehingga tidak bisa dijadikan dasar dalam penyusunan RAB. Kesalahan dalam penyusunan RAB ini menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan dan harus menunggu revisi RAB dan DPA untuk disesuaikan dengan Perbup tentang Standarisasi Indeks biaya kegiatan.

2. Pengaruh proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran

Hasil temuan kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, semakin baik proses pengadaan barang dan jasa maka akan mempercepat penyerapan anggaran sesuai

jadwal yang telah ditetapkan, sebaliknya semakin tidak baik proses pengadaan barang dan jasa, maka akan memperlambat penyerapan anggaran.

Proses pengadaan barang dan jasa dapat diketahui bahwa rata – rata (*mean*) responden terhadap dua puluh enam pernyataan sebesar 4,2818. Nilai rata-rata tersebut berada di kisaran sangat tidak baik, artinya proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dilaksanakan dengan sangat tidak baik. Indikator ketakutan pejabat untuk melaksanakan pengadaan akibat pemberitaan penangkapan pejabat dengan tuduhan korupsi mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,52, sedangkan keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan merupakan penilaian paling rendah dengan nilai rata-rata 3,83.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Herriyanto (2012), yang menemukan bahwa faktor pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/ Lembaga di wilayah Jakarta.

3. Pengaruh sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran

Hasil temuan ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, artinya semakin tidak baik sumber daya manusia yang ada, maka akan memperlambat penyerapan anggaran, sebaliknya jika sumber daya manusia semakin baik maka akan mempercepat penyerapan anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pertanyaan kuisioner mengenai sumber daya manusia yang dijawab oleh responden, pertanyaan kuisioner yang dijawab oleh sebagian besar responden adalah pilihan jawaban pada skala 4 atau dalam kategori sangat kurang baik, artinya sumber daya manusia yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sangat tidak baik. Indikator mekanisme reward dan punishment dalam pengelolaan anggaran SKPD mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,41, sedangkan kultur/kebiasaan menunda

pekerjaan pada SKPD merupakan penilaian paling rendah dengan nilai rata-rata 4,18.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang telah dilakukan oleh Herriyanto (2012), yang menemukan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta.

4. Pengaruh regulasi terhadap penyerapan anggaran

Hasil temuan keempat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, artinya semakin tidak baik regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, maka akan memperlambat penyerapan anggaran, sebaliknya jika regulasi semakin baik maka akan mempercepat penyerapan anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Variabel regulasi dapat diketahui bahwa rata – rata (*mean*) responden terhadap delapan pernyataan sebesar 3,8650. Nilai rata-rata tersebut berada di kisaran tidak baik, artinya regulasi mengenai pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang belum berjalan dengan baik. Indikator Peraturan Bupati mengenai indeks standarisasi harga/biaya dan keterlambatan Petunjuk Teknis kegiatan yang bersumber dari APBN/ APBD Provinsi mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,22, sedangkan ketidak harmonisan peraturan terkait antara perencanaan, pelaksanaan dan pencairan anggaran merupakan penilaian paling rendah dengan nilai rata-rata 3,37.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Arif dan Abdul Halim (2013), yang menemukan bukti empiris bahwa faktor regulasi mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2011.

5. Pengaruh proses pencairan dana terhadap penyerapan anggaran

Hasil temuan kelima dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses pencairan dana berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, artinya semakin tidak baik proses

pencairan dana, maka akan memperlambat penyerapan anggaran, sebaliknya jika proses pencairan dana semakin baik maka akan mempercepat penyerapan anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Variabel proses pencairan dana dapat diketahui bahwa rata – rata (*mean*) responden terhadap sepuluh pernyataan sebesar 4,29. Nilai rata-rata tersebut berada di kisaran sangat tidak baik, artinya proses pencairan dana di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dilaksanakan dengan sangat tidak baik. Indikator proses revisi anggaran mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,50, sedangkan dokumen lampiran pembayaran gaji merupakan penilaian paling rendah dengan nilai rata-rata 3,86.

Haryanto dan Wihascaryo (2011) dalam Seftianova dan Helmy Adam (2013) mengungkapkan bahwa Terkait dengan permasalahan tagihan Satker karena pencairan tidak selalu langsung dilakukan (ditumpuk & dilakukan 2 bulan sekali). Apabila tingkat akurasi penarikan dana yang rendah ini dibiarkan terjadi berlarut-larut maka akan mendorong terjadinya masalah penyerapan anggaran yang terkonsentrasi pada akhir tahun dimana SKPD berupaya mencairkan seluruh pagu dana yang tercantum dalam DPA.

PENUTUP

Kesimpulan

Keterlambatan penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sangat tinggi, hal ini disebabkan oleh : kurang baiknya perencanaan anggaran dan kegiatan, tidak baiknya pengadaan barang dan jasa, tidak baiknya kualitas sumber daya manusia, tidak baiknya regulasi dan proses pencairan dana.

Regulasi merupakan faktor paling dominan penyebab keterlambatan penyerapan anggaran yang diikuti dengan perencanaan anggaran dan kegiatan, proses pencairan dana, proses pengadaan barang dan jasa dan sumber daya manusia.

Persoalan krusial keterlambatan penyerapan anggaran yang terkait dengan masalah regulasi adalah ketidak jelasan aturan terkait dengan masalah anggaran. Kondisi ini

diperparah dengan proses pencairan dana yang birokrasinya terlalu tinggi.

Ketidak sesuaian antara Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan satuan biaya (satuan biaya lebih kecil dari RAB) merupakan persoalan krusial dalam perencanaan anggaran. Ketakutan para pejabat pelaksana pengadaan barang dan jasa (karena isu penangkapan koruptor) untuk melaksanakan tugasnya dan kurang baiknya proses pengadaan barang dan jasa merupakan masalah krusial dalam pengadaan barang dan jasa. Persoalan krusial dalam hal sumberdaya manusia adalah tidak adanya mekanisme reward dan punishment dalam pengelolaan anggaran SKPD..

Keterbatasan Penelitian

1. Pada penelitian ini data diambil secara *cross sectional* (hanya sesaat pada waktu tertentu saja), sehingga fenomena yang diteliti hanya merupakan potret sesaat dan diduga responden dalam pengisian kuesioner dipengaruhi oleh persepsi saat itu saja, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan.
2. Koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan belum bagus, yang artinya fit model dalam penelitian masih belum baik, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan beberapa variabel di luar penelitian ini

Implikasi Kebijakan

1. Perlu perbaikan sistem perencanaan anggaran dan kegiatan khususnya penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sering tidak sesuai/ lebih tinggi dari satuan biaya.
2. Perlu perbaikan dalam pengadaan barang dan jasadengan memperhatikan ketakutan pejabat untuk melaksanakan pengadaan akibat pemberitaan penangkapan pejabat dengan tuduhan korupsi.
3. Perlu pengembangan budaya kerja efektif yang berorientasi pada perbaikan mekanisme reward dan punishment dalam pengelolaan anggaran SKPD.
4. Pemerintah perlu memperjelas aturan (regulasi) danperlu memperhatikan

mengenai Peraturan Bupati mengenai indeks standarisasi harga/ biaya dan keterlambatan Petunjuk Teknis kegiatan yang bersumber dari APBN/ APBD Provinsi.

5. Perlu perbaikan mekanisme pencairan dana dengan memperpendek alur dan memperhatikan lamanya proses revisi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Priatno, Prasetyo. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. Skripsi (Tidak Dipublikasikan). Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Arifin Siregar, Muhammad. 2008. Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Semarang: Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro.
- Budimanta, Arif. dkk. 2008. Corporate Sosial Responsibility Alternatif bagi Pembangunan Indonesia. Jakarta: ICSD.
- Djarwanto. 2002. Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Dwi Kuncoro, Egiastyo. 2013. Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov. Kaltim. Kalimantan Timur: Fakultas Administrasi Bisnis. Universitas Mulawarman.
- Dwi Kuswoyo, Iwan. 2011. Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran: Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.
- Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS.

- Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handaya Ningrat, Soewarno. 2008. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.
- Herriyanto, Hendris. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miliasih, Retno. 2012. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Nawawi. 2001. Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit yang Kompetitif. Yogyakarta: GM University Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006.